

LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Dinas
pmpptsp



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063
website : dpmptsp.bulelengkab.go.id
email: dpmptsp@bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2019 bertujuan memberikan informasi kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan yang memberikan informasi tentang keberhasilan ataupun kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kinerja. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2019 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Laporan ini juga disusun sebagai syarat evaluasi dan analisa terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada rencana strategis SKPD, selama tahun anggaran berjalan. Sehingga dapat dilihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2019 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2018. Laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat positif guna penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan laporan yang representatif.

Singaraja, 2 Januari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



Drs. I Putu Artawan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19611231 198603 1 225

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	2
1.4. Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Perencanaan Strategis	20
2.2. Indikator Penetapan Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.2. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN	24



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar PNS Berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.2 Daftar PNS Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 1.3 Daftar PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019	23
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	24
Tabel 3.1 Data Realisasi Investasi Tahun 2019	26
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019	26
Tabel 3.3 Data Realisasi Investasi Tahun 2017-2019.....	27
Tabel 3.4 Perbandingan Data Realisasi Investasi Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	27
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2019.....	27
Tabel 3.6 Data Rencana dan Realisasi Investasi Tahun 2019 Berdasarkan Sektor.....	37
Tabel 3.7 Realisasi Penggunaan Listrik dan Air Tahun 2019	41
Tabel 3.8 Rekap Jumlah Izin Terbit Tahun 2019	45
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019.....	46
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PPTSP 6



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2019 menyajikan hasil-hasil kinerja yang dicapai selama tahun 2019 sebagai bahan evaluasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan visi dan misi, yang harus mendapat perhatian secara terus menerus, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Pada LKjIP juga dianalisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Laporan ini yang memuat permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta analisis permasalahan dan solusi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan terwujudnya sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sekaligus mempersiapkan organisasi pembelanjaan yang merupakan paradigma baru bagi birokrasi seiring dengan meningkatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Evaluasi dan analisa juga disertakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dan hasilnya digunakan untuk melakukan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya dengan lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan perizinan dan non perizinan serta memberikan kepastian berusaha bagi investor.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta bebas dari KKN telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKjIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP yang baik harus

didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. LKjIP berisikan rencana, target, capaian dan realisasi anggaran sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat laporan yang baik jika kinerja instansi tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja. LKjIP bisa digunakan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kondisi Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan.

1.3.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3.4. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal

- b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
- 6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
- 7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
 - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sampai akhir tahun 2019 berjumlah 33 orang termasuk pimpinan terbagi kedalam 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 12 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Disamping tenaga PNS kami dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer daerah dan 58 orang tenaga kerja kontrak, sehingga jumlah personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sebanyak 93 orang. Data PNS diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, sebagai berikut

- 1) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1 Daftar PNS Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
2	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
3	Pengatur (II/c)	2	2	4
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
5	Penata Muda (III/a)	4	2	6
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	4	-	4
7	Penata (III/c)	5	2	7
8	Penata Tk. I (III/d)	3	1	4
9	Pembina (IV/a)	2	3	5
10	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-
11	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
TOTAL :		22	11	33

- 2) Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Daftar PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	4	2	6
3	Eselon IV	7	5	12
4	Staf	9	6	15
TOTAL :		21	13	33

- 3) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

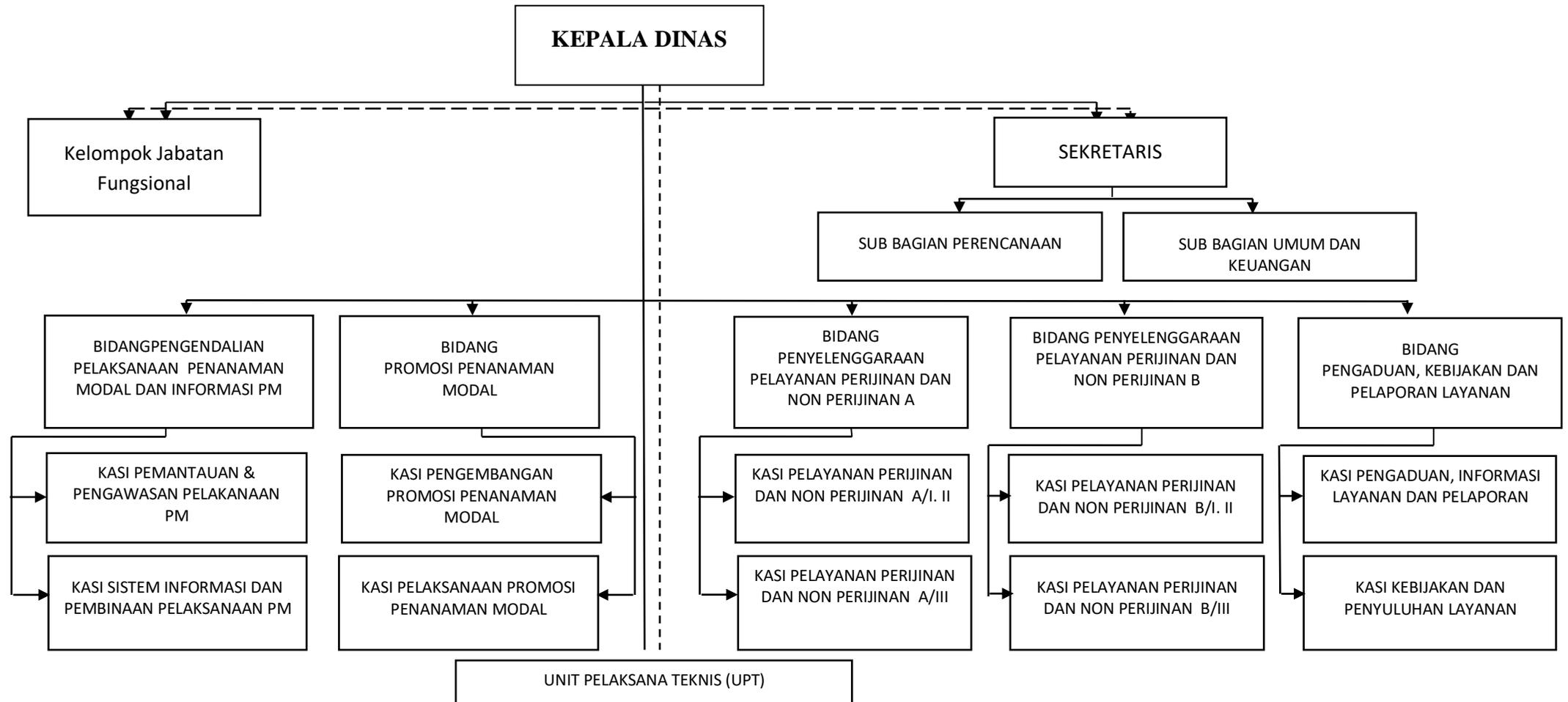


Tabel 1.3 Daftar PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	7	2	-	-	-	9
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	1	3	-	-	-	-	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	-	2	1	1	-	-	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	-	3	1	3	-	-	7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	1	3	-	-	-	-	4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	4	-	-	-	-	4
	TOTAL	2	23	4	4	-	-	33

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada gambar berikut.

Nomor : 75 Tahun 2016
 Tanggal : 28 Desember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



1.3.5. Kondisi Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perijinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal. Jumlah izin yang ditangani sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah 213 (dua ratus tiga belas) jenis perizinan dan non perizinan yang penyelenggaraannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 16 (enam belas) izin dikelola oleh Bidang A dan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) jenis perizinan dan non perizinan dikelola oleh Bidang B.

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

Penanaman Modal

Non Perizinan

1. Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Membangun

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perizinan

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
4. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)

Non Perizinan

5. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
6. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)
7. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk : Reklame, Menara, Gardu atau bangunan lainnya, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon/Selular, Pemadam Kebakaran, Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perizinan

8. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
9. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan



Non Perizinan

10. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

Ketenagakerjaan

Perizinan

11. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)/ Validasi DKP-TKA

Pertanahan

Perizinan

12. Izin Lokasi (IL)
13. Izin Membuka Tanah

Perhubungan

Perizinan

14. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Hekikopter

Perikanan

Perizinan

15. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Perdagangan

Perizinan

16. Izin Reklame

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

Pendidikan

Perizinan

17. Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
18. Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD)
19. Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
20. Izin Operasional Pendirian Anak Usia Dini (PAUD)
21. Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
22. Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain (KOBER)
23. Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
24. Izin Operasional Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
25. Izin Operasional Pendirian Kelompok Belajar Kesetaraan

Kesehatan

Perizinan

26. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe C
27. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe C
28. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe D



29. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe D
30. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pratama Tipe D
31. Izin Operasional Rumah Sakit Pratama Tipe D
32. Izin Mendirikan Puskesmas
33. Izin Operasional Puskesmas
34. Izin Apotek
35. Izin Toko Obat
36. Izin Toko Alat Kesehatan
37. Izin Optikal
38. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
39. Izin Praktik Dokter Umum
40. Izin Praktik Dokter Spesialis
41. Izin Praktik Dokter Gigi
42. Izin Praktik Dokter Interenship
43. Izin Praktik Bidan
44. Izin Praktik Apoteker (SIPA/Surat Izin Kerja (SIK))
45. Izin Praktik Perawat
46. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
47. Izin Praktik Fisioterapis
48. Izin Praktik Radiografer
49. Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien
50. Izin Penyelenggara Laboratorium Kesehatan
51. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (PESCONTROL)
52. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik (ATLM)
53. Izin Praktik Perawat Anastesi
54. Surat Izin Kerja Sanitarian
55. Izin Praktik Tenaga Gizi
56. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
57. Izin Praktik Rekam Medis
58. Izin Mendirikan Klinik
59. Izin Operasional Klinik
60. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
61. Izin Salon
62. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)
63. Izin Psikologi Klinis
64. Izin Epidemiolog Kesehatan
65. Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku
66. Izin Pembimbing Kesehatan Kerja

67. Izin Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
68. Izin Biostatistik dan Kesehatan
69. Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
70. Izin Entomolog Kesehatan
71. Izin Mikrobiolog Kesehatan
72. Izin Okupasi Terapis
73. Izin Akupuntur
74. Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
75. Izin Teknik Kardiovaskular
76. Izin Teknis Pelayanan Darah
77. Izin Praktik Refraksionis Optisien
78. Izin Teknisi Gizi
79. Izin Audiologis
80. Izin Teknik Elektromedis
81. Izin Fisikawan Medik
82. Izin Radioterapis
83. Izin Ortotik Prostetik
84. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
85. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan
86. Izin Industri Rumah Tangga Pangan
87. Izin Laik Hygiene Sanitasi Hotel
88. Izin Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan
89. Izin Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
90. Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
91. Izin Produksi Pangan Rumah Tangga

Non Perizinan

92. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel
93. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan
94. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
95. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
96. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Sosial

Perizinan

97. Izin Pengumpulan Sumbangan
98. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Non Perizinan

99. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)



Ketenagakerjaan

Perizinan

- 100. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- 101. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
- 102. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIU-LPPRT)
- 103. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Lingkungan Hidup

Perizinan

- 104. Izin Lingkungan
- 105. Izin Pendaaurulan/Pengolahan Sampah (Swasta)
- 106. Izin Pengangkutan Sampah (Swasta)
- 107. Izin Pemrosesan Akhir Sampah (Swasta)
- 108. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
- 109. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
- 110. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3
- 111. Izin Pembuangan Air Limbah

Non Perizinan

- 112. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)

Perhubungan

Perizinan

- 113. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (IUA)
- 114. Izin Trayek
- 115. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
- 116. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir

Koperasi Usaha Kecil Menengah

Perizinan

- 117. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam
- 118. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
- 119. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
- 120. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

Non Perizinan

- 121. Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi

Kebudayaan

Perizinan

- 122. Izin Membawa Cagar Budaya



Kearsipan

Perizinan

123. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup

Pariwisata

Non Perizinan

- 124. TDUP Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
- 125. TDUP Pengelolaan Goa
- 126. TDUP Pengelolaan Peninggalan Sejarah
- 127. TDUP Pengelolaan Museum
- 128. TDUP Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat
- 129. TDUP Pengelolaan Objek Sejarah
- 130. TDUP Wisata Agro
- 131. TDUP Kawasan Pariwisata
- 132. TDUP Usaha Angkutan Jalan Wisata
- 133. TDUP Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
- 134. TDUP Usaha Biro Perjalanan Wisata
- 135. TDUP Usaha Agen Perjalanan Wisata
- 136. TDUP Usaha Restoran
- 137. TDUP Usaha Rumah Makan
- 138. TDUP Usaha Kafe
- 139. TDUP Usaha Bar/Rumah Minum
- 140. TDUP Usaha Jasa Boga
- 141. TDUP Usaha Pusat Penjualan Makanan
- 142. TDUP Usaha Hotel
- 143. TDUP Usaha Bumi Perkemahan
- 144. TDUP Usaha Villa/Cottage/Bungalo/ Guest House
- 145. TDUP Usaha Pondok Wisata
- 146. TDUP Usaha Jasa Manajemen Hotel
- 147. TDUP Usaha Hunian atau Wisata Senior/ Lanjut Usia
- 148. TDUP Usaha Rumah Wisata
- 149. TDUP Motel
- 150. TDUP Usaha Lapangan Golf
- 151. TDUP Usaha Rumah Biliar
- 152. TDUP Usaha Gelanggang Renang
- 153. TDUP Usaha Lapangan Tennis
- 154. TDUP Usaha Gelanggang Bowling
- 155. TDUP Sanggar Seni
- 156. TDUP Galeri Seni

- 157.TDUP Gedung Pertunjukan Seni
- 158.TDUP Wisata Ekstrim
- 159.TDUP Arena Permainan
- 160.TDUP Kelab Malam
- 161.TDUP Diskotik
- 162.TDUP Pub
- 163.TDUP Usaha Rumah Pijat
- 164.TDUP Usaha Taman Rekreasi
- 165.TDUP Usaha Taman Bertema
- 166.TDUP Usaha Karaoke
- 167.TDUP Usaha Jasa Impresariat/Promotor
- 168.TDUP Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- 169.TDUP Jasa Informasi Pariwisata
- 170.TDUP Jasa Konsultan Pariwisata
- 171.TDUP Jasa Pramuwisata
- 172.TDUP Usaha Wisata Arum Jeram
- 173.TDUP Usaha Wisata Dayung
- 174.TDUP Usaha Wisata Selam
- 175.TDUP Usaha Wisata Memancing
- 176.TDUP Usaha Wisata Selancar
- 177.TDUP Usaha Wisata Olahraga Tirta
- 178.TDUP Usaha Dermaga Wisata
- 179.TDUP Usaha SPA
- 180.TDUP Usaha Rumah Kos

Pertanian

Perizinan

- 181.Izin Usaha Perkebunan
- 182.Izin Usaha Tanaman Pangan
- 183.Izin Usaha Kortikultura
- 184.Izin Usaha Peternakan
- 185.Izin Usaha Obat Hewan
- 186.Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
- 187.Izin Usaha Rumah Sakit Hewan
- 188.Izin Usaha Pasar Hewan
- 189.Izin Usaha Pematangan Hewan dan Penyediaan Daging
- 190.Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
- 191.Izin Pengangkutan Kayu Rakyat

Non Perizinan

- 192.Pendaftaran Usaha Perkebunan
- 193.Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
- 194.Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
- 195.Pendaftaran Usaha Peternakan

Perdagangan

Perizinan

- 196.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 197.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
- 198.Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB)
- 199.Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Kerosok
- 200.Izin Usaha Sarang Burung Walet
- 201.Izin Usaha Penimbunan Bahan Bakar Minyak
- 202.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
- 203.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
- 204.Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Non Perizinan

- 205.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 206.Tanda Daftar Gudang (TDG)
- 207.Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
- 208.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Industri

Perizinan

- 209.Izin Usaha Industri (IUI)
- 210.Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
- 211.Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
- 212.Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Kesatuan Bangsa dan Politik

Non Perizinan

- 213.Rekomendasi Penelitian

Secara garis besar, prosedur dan proses dalam pengurusan permohonan ijin baik teknis maupun non teknis adalah seperti di bawah ini hanya saja jika pengurusan permohonan izin non teknis tidak adanya pembayaran ke loket pembayaran. Prosedur pengurusan perizinan adalah sebagai berikut.

1. Pemohon mendatangi loket informasi dan pengaduan untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan.
2. Petugas loket memberikan Informasi tentang persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan serta memberikan formulir pendaftaran.
3. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan secara lengkap kepada petugas loket pelayanan.
4. Petugas loket (*Front Office*) pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan termasuk dalam kategori permohonan izin baru, permohonan daftar ulang dan salinan. Jika lengkap akan diteruskan ke petugas verifikasi (*back office*) dan menyerahkan nomor registrasi ke pemohon, jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Petugas verifikasi (*back office*) menerima dan mengecek permohonan yang masuk. Jika sesuai akan membuat draf surat undangan ke lapangan bagi Tim Teknis dan penjadwalan pemeriksaan ke lapangan serta menambahkan lembar disposisi pada berkas dan diserahkan kepada kepala seksi. Jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
6. Kepala Seksi memeriksa berkas dan draf surat undangan. Jika sesuai akan memaraf lembar disposisi dan mengajukan kepada Kepala Bidang untuk memohon tindak lanjut. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
7. Kepala Bidang memeriksa berkas dan draf surat undangan. Jika sesuai, akan mengajukan persetujuan verifikasi lapangan serta menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan verifikasi lapangan. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
8. Tim teknis melakukan pemeriksaan dan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diserahkan kepada Kepala Seksi.
9. Kepala Seksi menerima hasil BAP dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang untuk membahas tindak lanjut. Jika hasil BAP Sesuai dengan peraturan, akan menugaskan petugas untuk mencetak konsep izin dan melakukan perhitungan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai akan membuat surat penolakan yang ditujukan kepada pemohon.
10. Petugas pencetakan mencetak konsep izin dan melakukan perhitungan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan diserahkan kepada pemohon sebagai dasar pembayaran Retribusi di Locket Pembayaran dan Kasir.
11. Pemohon menerima dan melakukan pembayaran retribusi sesuai SKRD/SKPD.

12. Petugas pembayaran menerima biaya pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran.
13. Petugas pencetakan melakukan pencetakan dan memberikan penomoran pada surat izin dan diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi.
14. Kepala Seksi menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
15. Kepala Bidang menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
16. Kepala Dinas Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan tandatangan pada surat izin dan diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
17. Loket penyerahan izin meregister dan mengarsipkan salinan izin yang terbit dan menyerahkan surat izin asli kepada pemohon.
18. Pemohon menerima surat izin sesuai yang dimohonkan.

1.4. Isu Strategis

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal;
- b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- c. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi di antaranya:
 - 1) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 2) Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
 - 3) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
 - 4) Adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia sebanyak 22 orang khususnya Tenaga di bidang teknis;
- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Belum berjalannya fungsi Front office sebagai verifikasi berkas permohonan, Layanan Informasi dan Pengaduan, Penyerahan Izin, Back Office sebagai validasi berkas permohonan dan Operator sebagai pencetak izin di mana dengan kondisi terkini front office diambil alih langsung oleh

masing-masing Bidang penerbit izin sehingga jumlah izin keluar tidak sinkron dengan data register

- d. Standar Pelayanan (SP) yang sudah disusun belum disosialisasikan kepada SKPD terkait
- e. Pelimpahan izin belum dituangkan ke dalam tupoksi yang terbaru dan penyesuaian nama menjadi DPMPTSP Kabupaten Buleleng
- f. Keseluruhan Izin belum dilakukan secara online baik melalui OSS
- g. Arsip masih dilakukan secara manual Belum dilakukan scan arsip
- h. Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai

1.4.2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- b. Penerapan Pelayanan Perijinan berbasis IT.
- c. Berkembangnya jumlah pengusaha dan investor ke Kabupaten Buleleng.
- d. Pelayanan terhadap layanan investasi sudah membaik namun masih terkendala oleh menurunnya perkembangan ekonomi nasional sehingga perlu ditingkatkan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- e. Peningkatan status Lembaga dari Badan menjadi Dinas.
 - a. Merupakan daerah perkotaan sehingga berpotensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi
 - b. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng yang mampu menyerap tenaga kerja
 - c. Tersedianya tempat dan event pameran yang berskala Nasional sebagai tempat promosi peluang investasi di Kabupaten Buleleng

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus ijin dan melakukan investasi misalnya masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya sehingga monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan masih belum optimal;
- b. Belum adanya obyektivitas yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan penilaian dalam Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Perubahan regulasi dan aplikasi yang harus digunakan untuk kegiatan penanaman modal
- d. Adanya pelaku usaha yang tidak memahami kewajiban dalam kegiatan Penanaman Modal
- e. Sulit menghubungi dan bertemu penanggung jawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan monev
- f. Belum semua pelaku usaha/masyarakat menguasai IT
- g. Penerbitan Surat Rekomendasi dari Dinas Terkait dan Penyelesaian Kajian dan BAP dari Tim Teknis lama dikirimkan ke dinas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja. Namun demikian, sebelum diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja, terlebih dahulu diuraikan perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena perjanjian kinerja mengacu kepada RPJMD dan bertujuan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan yang termuat dalam RPJMD.

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai instansi yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal agar pelaksanaan kegiatannya dapat sejalan dengan RPJMD dan perkembangannya dari tahun ke tahun dapat diukur dengan jelas.

2.1.1 Pernyataan Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang yang secara dinamis dipengaruhi oleh beberapa paradigma pembangunan kota di antaranya *Smart city*, *Livable city*, *Sustainable Deevlopment Goals (SDGs)* serta kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (2017- 2022), dan merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Buleleng yang diantaranya berisi Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017–2022.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut



oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 (lima) tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN
TRI HITA KARANA**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mandiri**, mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- **Sejahtera**, mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
- **Berdaya Saing**, mengandung makna Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

2.1.2 Pernyataan Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Antara Visi dan Misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-1 yaitu “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*”.

2.1.3 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: “*pertumbuhan ekonomi yang inklusif*” melalui tujuan yaitu :

- a. Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang penanaman modal dan perijinan

2.1.4 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng adalah “*meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan*” melalui :

- a. Meningkatnya jumlah investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng;
- b. Kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
- c. Meningkatnya layanan perijinan melalui DPMPPTSP; dan
- d. Meningkatnya profesionalisme aparatur di bidang penanaman modal dan perijinan

2.1.5 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dalam pencapaian Misi I yang telah ditetapkan maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut

- a. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal di Kabupaten Buleleng;
- b. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- c. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

2.1.6 Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pula, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya;
- b. Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perijinan bagi investor;
- c. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi;
- d. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan;

- e. Merumuskan sistem promosi investasi dan sistem kerjasama investasi baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
- f. Merumuskan Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perijinan;
- h. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

2.1.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan terdiri dari program dan kegiatan penunjang dan urusan wajib.

1) Program dan Kegiatan Penunjang

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - l. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah
 - n. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 kegiatan yaitu:
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
 - c. Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - g. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Anggaran SKPD

Program Wajib yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu :

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
 - c. Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal

7. Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi terdiri dari 6 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
 - b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal
 - f. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi

8. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan
 - b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
 - c. Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan

9. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- a. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU
 - b. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame
10. Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A
- a. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan
 - b. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan.

2.2. Indikator Penetapan Kinerja

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017-2022 seperti tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 050/28/DPMPPTSP/2018

TANGGAL : 14 PEBRUARI 2018

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	<p>Penjelasan (Alasan) :</p> <p>Sesuai amanah UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No 25 2009 Tentang Pelayanan Publik, Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin prinsip PM dan Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP RUPMK</p> <p>Formula :</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Realisasi Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$	DPMPPTSP	DPMPPTSP	Realisasi Investasi

2.2.1. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penetapan kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2019 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Strategis DPMPTSP dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran. Pada bagian ini akan diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sesuai yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Kinerja Utama

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2019

Target investasi pada tahun 2019 adalah Rp. 1.261.266.173.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), dan realisasinya adalah adalah Rp.

52.439.561.185.245,00 (*Lima Puluh Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) dengan capaian 4157.69%, dari target 1% mampu tercapai sebesar 286,55%. Peningkatan yang cukup besar dan signifikan ini dikarenakan adanya dengan permintaan dari Lemhanas, Irjen dan Provinsi di mana tidak hanya investasi dari Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 saja namun juga diakumulasi dengan investasi yang berasal dari SIUP dengan modal usaha lebih besar dari Rp. 200.000.000,00. Nilai Investasi dari PPM (PMDN) realisasinya adalah Rp. 42.037.658.507.729,00, Nilai Investasi dari PPM (PMA) realisasinya adalah Rp. 10.401.902.677.516,00, sedangkan nilai investasi yang berasal dari SIUP sebesar Rp. 145.215.537.788,00. Tabel 3.1 adalah data realisasi investasi dari Triwulan I- Triwulan IV.

Tabel 3.1 Data Realisasi Investasi Tahun 2019

TW	Realisasi Investasi			Tenaga Kerja (Orang)
	PPM	SIUP	Total	
I	Rp. 29.639.809.200.254	Rp.39.295.318.121	Rp. 29.679.104.518.375	1.824
II	Rp 20.446.398.269.045	Rp 33.413.500.000	Rp. 20.479.811.769.045	1.683
III	Rp. 1.719.021.116.766	Rp.39.681.719.667	Rp. 1.758.702.836.433	2.555
IV	Rp. 634.332.599.180	Rp.32.825.000.000	Rp. 667.157.599.180	752
	Rp. 52.439.561.185.245	Rp.145.215.537.788	Rp. 52.584.776.723.033	6.814

Namun jika dihitung persentase peningkatan nilai investasi dari target 1% dapat tercapai sebesar 286,55%. Nilai ini diperoleh dari formulasi/cara pengukuran sesuai yang tercantum pada IKU yaitu dengan rumus “jumlah realisasi tahun berjalan-jumlah realisasi tahun lalu/jumlah realisasi tahun lalu 100%”.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	Rp. 1.261.266.173.000	Rp. 52.439.561.185.245	286,55%

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Beberapa Tahun Terakhir

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng baru menangani urusan penanaman modal pada tahun 2017.

Tabel 3.3 Data Realisasi Investasi Tahun 2017-2019

Tahun	Investasi	Penggunaan Tenaga Kerja (Orang)
2017	Rp. 1.092.662.246.708	3.763
2018	Rp. 13.566.022.871.669	2.031
2019	Rp . 52.439.561.185.245	6.814

Pada tahun 2019 sesuai dengan Renstra 2017-2022 hanya terdapat 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi. Perbandingan investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 dengan tahun 2019 adalah seperti pada tabel 3.3.

Tabel 3.4 Perbandingan Data Realisasi Investasi Tahun 2018 dan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	Rp. 1.248.778.3 89.000 (1%)	Rp. 13.566.022. 871.669 (997,21%)	997,21%	Rp. 1.261.266. 173.000 (1%)	Rp. 52.439.561. 185.245 (997,21%)	286,55%

Sedangkan untuk realisasi kinerja pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2018 adalah seperti pada tercantum pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				122,93			126,11
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Exemplar	1.300	4.432	1.200	5.262	438,50
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	Rekening Kantor	84	84	84	84	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	Unit/ Bulan	24	2	2	2	100
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	Unit	22	21	22	22	100
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	100
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	Jenis	28	28	28	28	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	Jenis	50	50	50	50	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	Jenis	11	8	9	9	100
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	Jenis	4	4	4	4	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	37	51	24	24	100
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Rekening / Tahun	36	36	36	36	100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	%
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	Jenis	7	6	6	6	100
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	OH	115	96	115	146	127
14	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				92,9			100,00
15	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	1	1	1	1	100
16	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	Set/Paket	1	1	-	-	-
17	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	Jenis	7	7	6	6	100
18	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	Kegiatan	10	10	10	10	100
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai	Paket	1	1	-	-	-
20	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	Unit	22	18	22	22	100
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	Unit	7	7	7	7	100
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	Unit	15	15	7	15	100
23	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	Dokumen	4	4	4	4	100
24	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	Paket	1	1	-	-	-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata			100			100
25	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli	Unit	2	-	-	-	-
26	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Stel	40	34	-	-	-
27	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel	40	34	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	%
28	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50			
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	OH	4	2	-	-	-
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100			100
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	Dokumen	6	6	6	6	100
31	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	100
VI	Program Perencanaan Anggaran SKPD				100			100
32	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	100
VIII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				100			100
33	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	Kali	1	1	1	1	100
34	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	Investor	5	2 Kali	5	5	100
35	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	Kali	7	1	7	7	100,00
36	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman yang disusun	Dokumen	1				
IX	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				110			
37	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	Sistem	-	2	-	-	-
38	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Dokumen	-	1	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	%
39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	Investor	-	110	-	-	-
40	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Pengusaha	-	121	-	-	-
41	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah pemetaan titik reklame di sistem	Kecamatan	-	4	-	-	-
42	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	%	-	100	-	-	-
X	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah				100			
43	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	Dokumen	-	1	-	-	-
XI	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi							100,00
44	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	Sistem	1	-	1	1	100
45	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Dokumen	1	-	1	1	100
46	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	Dokumen	4	-	4	4	100
47	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Pengusaha	100	-	100	100	100
48	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah pemetaan titik reklame di sistem	Sistem	1	-	1	1	100
49	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	%	5 Kasus	-	-	-	-
50	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	Dokumen	1	-	1	1	100
51	Penyusunan Profil Investasi	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun	Dokumen	1	-	1	1	100
XII	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu				111,75			

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	%
52	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	Buku	-	4	-	-	-
53	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang perizinan	Kecamatan	-	9	-	-	-
54	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	Dokumen	-	2	-	-	-
55	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A1, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	-	3.907	-	-	-
56	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	-	499	-	-	-
57	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	-	2.306	-	-	-
58	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	-	1.150	-	-	-
XIII	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan							100,00
59	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	Buku	4	-	4	4	100
60	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang perizinan	Media	3	-	3	3	100
61	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	Dokumen	2	-	2	2	100
XIV	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A							131.40

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	%
62	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A1, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	2.500	-	2.500	3290	131,6
63	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	500	-	500	656	131.2
XV	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B							137.87
64	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	1.500	-	1.500	2405	160.33
65	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	1.500	-	1.500	1731	115.40
TOTAL					98,34			109.54

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Perencanaan Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi persentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan Renstra 2017-2022 seperti pada Lampiran 1. Realisasi kinerja program/kegiatan tahun 2019 jika dibandingkan dengan Renstra 2017-2022 adalah seperti pada Lampiran 2 dan Realisasi kinerja program/kegiatan tahun 2019 jika dibandingkan dengan Renja 2019 adalah seperti pada Lampiran 3.

d. Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif yang telah dilakukan

Nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sudah melebihi dari target yang ditentukan di mana target yang ditentukan adalah Rp. 1.261.266.173.000,00 dan realisasinya adalah adalah Rp. 52.439.561.185.245, dengan capaian 4157.69%, dari dari target 1% mampu tercapai sebesar 286,55%. Data rencana dan realisasi investasi tahun 2019 berdasarkan sektor dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Data Rencana dan Realisasi Investasi Tahun 2019 Berdasarkan Sektor

No	URAIAN	Total	Surat Persetujuan (Rp)	Surat Persetujuan (Rp)
1	2		4	10
I	SEKTOR PRIMER			
1	Perternakan	26.650.000.000	26.650.000.000	-
2	Kehutanan	1.140.000.000	1.140.000.000	-
3	Perikanan	26.635.507.652	26.635.507.652	-
4	Pertambangan	2.000.000	2.000.000	-
5	Tanaman Pangan dan perkebunan	200.000.000	200.000.000	-
	JUMLAH		54.627.507.652	-
II	SEKTOR SEKUNDER			
1	Industri Mineral Non logam	-	-	-
2	Industri Makanan	3.475.000.000	3.475.000.000	-
3	Industri tekstil	1.020.000.000	1.020.000.000	-
4	Industri barang dari kulit dan alas kaki	-	-	-
5	Industri Kayu	8.703.210.000	8.703.210.000	-
6	Industri kertas dan percetakan	-	-	-
7	Industri karet dan plastik	-	-	-
8	Industri logam, mesin dan	82.000.000	82.000.000	-
9	Industri kendaraan dan alat transportasi	-	-	-
10	Industri kendaraan bermotor	-	-	-
11	Industri lainnya	27.522.164.756.535	17.820.164.763.687	9.701.999.992.848
12	Industri kimia dan formasi	14.664.420.002	1.714.420.002	12.950.000.000
	JUMLAH		17.835.159.393.689	9.714.949.992.848
III	SEKTOR TERSIER			
1	Jasa Lainnya	10.726.246.591.395	10.458.658.576.595	267.588.014.800
2	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-
3	Konstruksi	74.414.687.844	74.414.687.844	-
4	Perdagangan dan Refarasi	761.282.665.259	745.082.665.259	16.200.000.000
5	Hotel dan Restoran	11.881.483.606.601	11.506.731.036.733	374.752.569.868
6	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	14.878.682.178	14.878.682.178	-
7	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1.376.518.057.779	1.348.105.957.779	28.412.100.000
	JUMLAH		24.147.871.606.388	686.952.684.668
	TOTAL INVESTASI		42.037.658.507.729	10.401.902.677.516

Rencana:

Primer		Primer
PMDN	54.627.507.652	PMDN
PMA	-	PMA
Jumlah	54.627.507.652	Jumlah
Sekunder		Sekunder
PMDN	17.835.159.393.689	PMDN
PMA	9.714.949.992.848	PMA
Jumlah	27.550.109.386.537	Jumlah
Tersier		Tersier
PMDN	24.147.871.606.388	PMDN
PMA	686.952.684.668	PMA
Jumlah	24.834.824.291.056	Jumlah
Total Rencana Investasi	52.439.561.185.245	Total Realisasi Investasi

Pelampauan target realisasi nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 disebabkan adanya permintaan dari Lemhanas, Irjen dan Provinsi di mana tidak hanya investasi dari Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 saja namun juga diakumulasi dengan investasi yang berasal dari SIUP dengan modal usaha lebih besar dari Rp. 200.000.000,00. Sehingga

terjadi peningkatan pada target tahunan yang awalnya ditargetkan hanya 1%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 286,55%. Selain itu juga dikarenakan adanya nilai investasi yang besar dari sektor sekunder yaitu Industri Lainnya PMDN sebesar Rp. 17.820.164.763.687,00, dari PMA sebesar Rp. 9.701.999.992.848,00 sehingga jumlah total realisasi investasi dari sektor sekunder Industri Lainnya sebesar Rp. 27.522.164.756.535,00, serta realisasi dari sektor tersier yaitu dari Jasa Lainnya sebesar Rp. 10.726.246.591.395,00 di mana pada PMDN sebesar Rp.10.458.658.576.595,00 dan PMA sebesar Rp. 267.588.014.800,00, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 11.881.483.606.601,00 di mana PMDN sebesar Rp. 11.506.731.036.733,00, dan dari PMA sebesar Rp. 374.752.569.868,00 dan dari Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar Rp. 1.376.518.057.779,00 di mana PMDN sebesar Rp. 1.48.105.957.779,00 dan dari PMA sebesar Rp. 28.412.100.000,00.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator ini didukung oleh 5 (lima) program pilihan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yaitu 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, 2) Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi, 3) Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan, 4) Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, dan 5) Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 3(tiga) kegiatan yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 94.67% dengan realisasi sebesar Rp. 690.615.769,00 dari anggaran sebesar Rp. 729.492.000,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah dengan tingkat efisiensi sebesar 2.06% dari anggaran Rp. 97.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.95.303.947,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 11.52% dari anggaran Rp. 282.459.000,00 terealisasi sebesar Rp.248.804.193,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Dan kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 0.93% dari anggaran Rp. 349.733.000,00 terealisasi sebesar Rp.3146.507.629,00 dengan capaian fisik sebesar 100%.

Program kedua yaitu Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi yang terdiri dari 6 (*enam*) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 95.00%, dan realisasi capaian keuangannya 99.11% dengan realisasi sebesar

Rp. 810.829.075,00 dari anggaran sebesar Rp. 818.100.000,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 0.27% dari anggaran Rp. 189.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 188.898.081,00 dengan capaian fisik sebesar 100%, kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 0.82% dari anggaran Rp. 102.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 101.764.640,00 dengan capaian fisik sebesar 100%, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan tingkat efisiensi sebesar 0.43% dari anggaran Rp. 231.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 230.506.450,00 dengan capaian fisik sebesar 100%, kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 1.79% dari anggaran Rp. 43.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 42.625.824,00 dengan capaian fisik sebesar 100%, kegiatan Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 0.20 dari anggaran Rp. 132.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 130.425.000,00 dengan capaian fisik sebesar 100%, dan kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait investasi dengan tingkat efisiensi sebesar 2.18% dari anggaran Rp. 119.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 116.608.080,00 dengan capaian fisik sebesar 100%.

Program Ketiga adalah Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan yang terdiri dari 3(tiga) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 98.93% dengan realisasi sebesar Rp. 415.143.388,00 dari anggaran sebesar Rp. 419.597.300,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan pertama yaitu Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dengan tingkat efisiensi sebesar 1.79% dari anggaran Rp. 76.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.75.132.291,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu dengan tingkat efisiensi sebesar 1.27% dari anggaran Rp. 202.997.300,00 terealisasi sebesar Rp.200.426.659,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Dan kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dengan tingkat efisiensi sebesar 0.37% dari anggaran Rp. 140.100.000,00 terealisasi sebesar Rp.139.584.438,00 dengan capaian fisik sebesar 100%.

Program keempat yaitu Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A yang terdiri dari 2(dua) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian keuangannya 97.65% dengan realisasi sebesar Rp. 683.787.526,00 dari anggaran sebesar Rp. 700.200.000,00 dengan capaian fisik sebesar 125.16%. Kegiatan pertama yaitu Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU, dengan



tingkat efisiensi sebesar 1.47% dari anggaran Rp. 497.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.490.509.478,00 dengan capaian fisik sebesar 131.52%. Untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame dengan tingkat efisiensi sebesar 4.51% dari anggaran Rp. 202.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 193.278.048,00 dengan capaian fisik sebesar 118.80%.

Program terakhir yaitu Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B yang terdiri dari 2(dua) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian keuangannya 99.75% dengan realisasi sebesar Rp. 585.409.271,00 dari anggaran sebesar Rp. 586.855.000,00 dengan capaian fisik sebesar 129.63%. Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan, dengan tingkat efisiensi sebesar 0.33% dari anggaran Rp. 292.649.000,00 terealisasi sebesar Rp. 291.710.193,00 dengan capaian fisik sebesar 140.93% sedangkan kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan dengan tingkat efisiensi sebesar 0.18% dari anggaran Rp. 294.206.000,00 terealisasi sebesar Rp. 293.699.078,00 dengan capaian fisik sebesar 118.33%.

- f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Program/kegiatan ini didukung oleh Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi yang terdiri dari 6 (*enam*) kegiatan dengan capaian fisik 100% dan tingkat capaian keuangan lebih dari 99.11%. Penerimaan PPM baik dari PMDN maupun PMA terdapat pada Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dari kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI,II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU tingkat capaian keuangan bahkan lebih dari 98.53% dengan capaian kinerja 131.52% dengan jumlah Izin Terbit pada Pendaftaran Penanaman Modal yaitu sebanyak 150 ijin. Untuk penerimaan investasi dari SIUP dari kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan tingkat capaian keuangan juga lebih dari 99% dan capaian kinerja 140.93% dengan penerimaan izin dari SIUP sebanyak 828 Ijin (Lampiran 8) dan nilai investasi yang lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sebesar Rp. 145.215.537.788,00 (Lampiran 9).

Kesimpulan Sasaran 1 :

1. Capaian Kinerja Tahun 2019 dari Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi dari target 1% mampu tercapai sebesar 286,55% berada di atas rentang



85 s.d 100 sehingga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi juga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

3.1.2. Capaian Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 14 (empat belas) kegiatan realisasi capaian fisiknya rata-rata sebesar 126,11 %, di mana pada umumnya serapan anggaran kegiatan rata-rata telah mencapai 98,87 %. Hampir di semua kegiatan pada program ini sudah mencapai target. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik sebanyak 5.262 eksamplar dari target yang ditentukan 1.200 exemplar atau sekitar 438.50%, hal ini dikarenakan jumlah surat keluar masuk yang tidak bisa diprediksi. Ada 1 (*satu*) kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 80,00% yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dikarenakan pada tahun ini tidak ada penggantian Flat kendaraan sehingga biaya ada efisiensi anggaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kami mampu berhemat atas penggunaan dari ketiga sarana tersebut terutama dari penggunaan Telepon dari target Rp70.000.000,00 hanya terpakai sebesar Rp60.575.141,00 atau sebesar 86.53%. Anggaran yang dialokasikan tidak semuanya harus terpakai, di mana untuk komponen penggunaan Air kami juga mampu menekan penggunaan air sehingga terjadi efisiensi seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Penggunaan Listrik dan Air Tahun 2019

Jenis Pembayaran	Tahun 2019			Jumlah Pemakaian
	Target	Realisasi	Persentase	
Listrik (2 Rekening)				
- 551600002667	45.000.000	41.755.552	92.79	18.757 Kwh
- 551600115505				6.944 Kwh
Air	6.800.000	3.684.840	54.18	563 M ³

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 7 (*tujuh*) kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 100% sedangkan untuk serapan anggaran yaitu 97.62%. Secara umum prosentase realisasi keuangan sudah lebih dari 90,00%, dan secara fisik sudah semua tercapai 100%. Pada tahun 2019 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 5.507.789.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.376.628.785,36 atau sebesar 97,61%,

dan untuk pembangunan gedung kantor pagu sebesar Rp. 4.735.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.734.075.646, dan realisasi fisik sudah 100%.

3. Capaian Kinerja dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Bimbingan Rohani dan Budaya Aparatur. Capaian kerjanya sudah mencapai 100,00% dan dari serapan anggaran juga 100,00%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 2 (*dua*) kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi fisiknya mencapai 100,00% dan serapan anggarannya mencapai 99.85%.
5. Capaian Kinerja pada Program Penyusunan Anggaran SKPD, dengan kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD, telah mampu direalisasi sebesar 100,00%, dan realisasi capaian keuangannya 99,88%.
6. Ada 2 (*dua*) program terkait dengan penanaman modal yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 3 (*tiga*) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 94.67%. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah untuk realisasi fisik dari target 1 Kali mampu terealisasi 1 kali atau sekitar 100,00%. *Matchmaking* yang dilaksanakan pada hari Senin, 11 Nopember 2019 bertempat di Hotel Aneka Lovina yang melibatkan seluruh UMKM di Lingkungan Kabupaten Buleleng dengan jumlah 70 UMKM. Narasumber berasal dari 1) Dewata Oleh-oleh Bali, 2) Arta Sedana, dan 3) Bank Rakyat Indonesia. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dari target 5 investor yang berminat menanamkan modalnya terealisasi 5 investor atau 100% yaitu 1) Ms. Siluta ten Hou, 2) Ms. Adam Smits, 3) Mr. Chong Hyuk, 4) Mr. Thomas dan 5) Mr. Alan Walker. Kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dari target 7 kali terealisasi 7 kali atau 100%. Pameran yang telah diikuti sebanyak 7 (*tujuh*) kali yaitu 1) pameran pertama dilaksanakan pada Minggu s.d Rabu, tanggal 10 s.d 13 Maret 2019 di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Banten yaitu Regional Investment Forum (RIF) yang diselenggarakan oleh BKPM dengan tema mengenai pentingnya teknologi digital dalam perkembangan ekonomi dan pariwisata Indonesia, 2) pameran kedua yaitu Indonesia Product Expo 2019 dilaksanakan di Jogja City Mall pada Kamis s.d Minggu, 4 s.d 7 April 2019, pameran ini diikuti oleh 12 Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota yang memamerkan produk unggulan Indonesia beserta potensi dan peluang investasinya serta



mendorong pengembangan pariwisata nasional, 3) kegiatan selanjutnya yang diikuti adalah Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2019 oleh Presiden RI yang dilaksanakan pada Rabu s.d Jumat, 3 s.d 5 Juli 2019 di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta yang dihadiri oleh Bupati seluruh Indonesia serta diikuti oleh Kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional dan multinasional. 4) Pameran keempat yaitu Pelaksanaan Sunda Kecil EXPO 2019 dan Kupang Trade Investment (TTI) EXPO 2019 di ruang lantai I dan halaman parkir Lippo Plaza Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tanggal 14 s.d 17 Nopember 2019, ada 3 (*tiga*) Provinsi yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu NTT, NTB dan Bali, yang ditampilkan dalam pameran ini adalah produk unggulan lokal meliputi tenun ikat, hasil rumput laut dan ikan, kelor dan produk lainnya. 5) Kegiatan kelima dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2019 yaitu Forum Investasi Sunda Kecil di mana menyampaikan potensi daerah di hadapan 19 Investor Tiongkok, untuk Bali Utara potensinya misalnya pembangunan hotel di wilayah Pejarakan seluas 250 Hektare, dari pemaparan tersebut ada beberapa investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Buleleng yaitu 1) China Hudadai General Energy Bali, 2) China Huadian Engineering CO.LTD, 3) PT. Konjen China Bali dan 4) PT. Yunnan Water Utilities Indonesia. 6) pameran yang diikuti adalah Buleleng Time Expo 2019 di Atrium Summarecon Mall Serpong Tangerang pada tanggal 15 s.d 17 Nopember 2019, kegiatan ini bertujuan untuk memamerkan dan mempromosikan semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng seperti produk unggulan yaitu olahan makanan, buah-buahan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan serta potensi budaya dan kepariwisataan. 7) Pameran di Bayanihan, Manila pada tanggal 16 s.d 21 Desember 2019 dalam Festival Bayanihan di mana mempromosikan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Buleleng persektor usaha dan wilayah dalam bentuk brosur, dan audio visual.

7. Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi yang terdiri dari 6 (*enam*) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 95.00%, dan realisasi capaian keuangannya 99.11%. Nilai investasi yang besar melebihi target dikarenakan adanya nilai investasi yang besar dari sektor sekunder yaitu Industri Lainnya PMDN sebesar Rp. 17.820.164.763.687,00, dari PMA sebesar Rp. 9.701.999.992.848,00 sehingga jumlah total realisasi investasi dari sektor sekunder Industri Lainnya sebesar Rp. 27.522.164.756.535,00, serta realisasi dari sektor tersier yaitu dari Jasa Lainnya sebesar Rp. 10.726.246.591.395,00 di mana pada PMDN sebesar Rp.10.458.658.576.595,00 dan PMA sebesar Rp. 267.588.014.800,00, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 11.881.483.606.601,00 di mana PMDN sebesar Rp. 11.506.731.036.733,00, dan dari PMA sebesar Rp. 374.752.569.868,00 dan dari Perumahan, Kawasan Industri



dan Perkantoran sebesar Rp. 1.376.518.057.779,00 di mana PMDN sebesar Rp. 1.48.105.957.779,00 dan dari PMA sebesar Rp. 28.412.100.000,00.

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi mencakup 3 (*tiga*) kegiatan telah mencapai target dengan rata-rata pencapaian fisik yaitu sebesar 100% dan serapan anggarannya 98.93%. Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan diperoleh angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan menyebarkan angket kepada 242 pemohon sebagai responden selama 2 (*dua*) semester yaitu semester I dan semester II. Target nilai IKM tahun 2019 adalah 80,80 pada Semester I terealisasi nilai IKM yaitu 80,81 di mana Berdasarkan analisa hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan yang meliputi 9 (*sembilan*) unsur pelayanan, ada 3 (*tiga*) unsur pelayanan yang di antaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan, yaitu 1) Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Kualitas Sarana dan Prasana, dengan nilai 3,0841, 2) Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Kecepatan Waktu Pelayanan, dengan nilai 3,1372 dan 3) Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Persyaratan Pelayanan, dengan nilai 3,2257. Pada Semester II survey dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 s.d 31 Desember 2019 terealisasi 80,84 di mana berdasarkan analisa hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan yang meliputi 9 (*sembilan*) unsur pelayanan, ada 3 (*tiga*) unsur pelayanan yang di antaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan, yaitu 1) Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Sarana dan Prasana, dengan nilai 2.8451, 2) Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur, dengan nilai 3,1239 dan 3) Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Waktu Penyelesaian, dengan nilai 3,1283 sehingga rata-rata nilai IKM semester I dan semester II yaitu 80,83 dan ini berarti nilai IKM tahun 2019 sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 100,04%.
9. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A, untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan PerIzinan Masyarakat AI,II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Izin Lokasi, IMB, Izin Prinsip, HO/SITU, dari target 2.500 Izin, realisasi jumlah Izin yang diterbitkan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3.290 Izin, atau sekitar 131.60%, hal ini dikarenakan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diprediksi jumlah permohonan izin yang masuk, dari yang ditargetkan 1.000 izin untuk 2019 terealisasi sebanyak 2.967 izin. Untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan PerIzinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Izin IUJK, Reklame dari target 500 Izin mampu terealisasi sebanyak 656 Izin atau sekitar



131.20%. Jadi untuk total Izin di bidang A dari target 3.000 Izin terealisasi sebanyak 3.946 Izin atau sekitar 131.53%.

10. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan PerIzinan Masyarakat B I, II pada sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan, kami menetapkan target sebanyak 1.500 Izin realisasi jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 2.405 Izin atau 160.33%, sedangkan kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perizinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan dari target sebanyak 1.500 Izin, realisasi jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 1.731 Izin atau sekitar 115.4%. Sehingga jumlah total Izin terbit Bidang B dari target 3.000 Izin mampu terealisasi sebanyak 4.136 Izin atau sekitar 137.87%. Jadi total jumlah Izin terbit baik di bidang A maupun di Bidang B selama tahun 2019 dari target 6.000 Izin terealisasi sebanyak 8.802 Izin atau sebesar 134,7%. Pada tabel 3.8 merupakan Rekap data ijin terbit dari Bidang A dan Bidang B pada tahun 2019.

Tabel 3.8 Rekap Jumlah Izin Terbit Tahun 2019

Bidang/ Seksi	Non Perizinan			Perizinan			Ijin Terbit Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Bidang A									
A/I.II	200	150	75,00	2300	3140	136,52	2500	3290	131,60
A/III	100	60	60,00	400	596	149,00	500	656	131,20
TOTAL IZIN TERBIT BIDANG A							3000	3946	131,53
Bidang B									
B/I.II	500	1118	223,60	1000	1287	128,70	1500	2405	160,33
B/III	20	535	2675	1480	1196	80,81	1500	1731	115,40
TOTAL IZIN TERBIT BIDANG B							3000	4136	137,87
TOTAL IZIN TERBIT							6000	8082	134,7

3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2019 melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan alokasi anggaran, diperoleh efisiensi pengeluaran sebesar 2,18% yaitu dari anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 10.970.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 10.731.305.994,36 dan efisiensi pengeluaran pada belanja tidak langsung sebesar 2.33% yaitu dari anggaran sebesar Rp 4.100.489.500,00 terealisasi sebesar Rp 4.005.247.101,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
I	Belanja Tidak Langsung	4.100.489.500,00	4.005.247.101,00	95.242.399	97,67
	1. Belanja Pegawai	4.100.489.500,00	4.005.247.101,00	95.242.399	97,67
II	Belanja Langsung	10.970.000.000	10.731.305.994,36	238.694.006	97,82
	1. Belanja Pegawai	702.157.000,00	698.152.800,00	4.004.200	99,42
	2. Belanja Barang Jasa	4.917.723.000,00	4.763.688.954,00	154.034.046	96,86
	3. Belanja Modal	5.350.120.000,00	5.269.464.240,36	80.655.760	98,49
	Total Belanja Daerah	15.070.489.500	14.736.553.095,36	333.936.405	97,78

Sumber data :LRA DPMPPTSP Kabupaten Buleleng TA. 2019
(Realisasi Belanja sebelum audit BPK)

Untuk lebih jelasnya, realisasi anggaran program dan kegiatan untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.559.132.500,00	1.526.067.416,00	33.065.084,00	98,87
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.801.500,00	67.801.500,00	0,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	60.575.141,00	9.424.859,00	86,53
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.030.000,00	175.192.650,00	5.837.350,00	96,77
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.800.000,00	5.992.300,00	3.807.700,00	61,14
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	304.600.000,00	304.177.910,00	422.090,00	99,86
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	135.700.000,00	133.740.040,00	1.959.960,00	98,55
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	245.095.000,00	237.794.810,00	7.300.190,00	97,02
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.500.000,00	21.095.822,00	1.404.178,00	93,75
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.993.890,00	6.110,00	99,87
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.820.000,00	178.634.295,00	185.705,00	99,89
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	24.925.000,00	24.859.559,00	65.441,00	99,73
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	155.261.000,00	154.576.999,00	684.001,00	99,55
14	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	150.200.000,00	148.232.500,00	1.967.500,00	98,69
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.757.789.000,00	5.620.980.989,36	136.808.010,64	97,62
15	Pembangunan Gedung Kantor	5.507.789.000,00	5.376.628.785,36	131.160.214,64	97,61
16	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	41.400.000,00	41.386.841,00	13.159,00	99,96
17	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	30.000.000,00	29.998.190,00	1.810,00	99,99
18	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/Operasional	102.400.000,00	96.995.433,00	5.404.567,00	94,72
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	7.000.000,00	6.999.850,00	150,00	99,99
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	5.000.000,00	4.999.390,00	610,00	99,98
21	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	64.200.000,00	63.972.500,00	227.500,00	99,64
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
22	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	124.616.000,00	124.432.855,00	183.145,00	99,85
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.350.000,00	94.168.855,00	181.145,00	99,80
24	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	30.266.000,00	30.264.000,00	2.000,00	99,99
V	Program Perencanaan Anggaran SKPD	154.218.200,00	154.039.705,00	178.495,00	99,88
25	Penyusunan Anggaran SKPD	154.218.200,00	154.039.705,00	178.495,00	99,88

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
VI	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	729.492.000,00	690.615.769,00	38.876.231,00	94,67
26	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	97.300.000,00	95.303.947,00	1.996.053,00	97,94
27	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	282.459.000,00	248.804.193,00	33.654.807,00	88,08
28	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	349.733.000,00	346.507.629,00	3.225.371,00	99,07
VII	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	818.100.000,00	810.829.075,00	7.270.925,00	99,11
29	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	189.400.000,00	188.899.081,00	500.919,00	99,73
30	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	102.600.000,00	101.764.640,00	835.360,00	99,18
31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	231.500.000,00	230.506.450,00	993.550,00	99,57
32	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	43.400.000,00	42.625.824,00	774.176,00	98,21
33	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	132.000.000,00	130.425.000,00	1.575.000,00	99,80
34	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	119.200.000,00	116.608.080,00	2.591.920,00	97,82
VIII	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	419.597.300,00	415.143.388,00	4.453.912,00	98,93
35	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	76.500.000,00	75.132.291,00	1.367.709,00	98,21
36	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	202.997.300,00	200.426.659,00	2.570.641,00	98,73
37	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	140.100.000,00	139.584.438,00	515.562,00	99,63
IX	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A	700.200.000,00	683.787.526,00	16.412.474,00	97,65

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
38	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	497.800.000,00	490.509.478,00	7.290.522,00	98,53
39	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	202.400.000,00	193.278.048,00	9.121.952,00	95,49
X	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	586.855.000,00	585.409.271,00	1.445.729,00	99,75
40	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	292.649.000,00	291.710.193,00	938.807,00	99,67
41	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	294.206.000,00	293.699.078,00	506.922,00	99,82
TOTAL		10.970.000.000,00	10.731.305.994,36	238.694.005,64	97,82

BAB IV

PENUTUP

Dengan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab IV Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat di simpulkan secara umum atas capaian kinerja serta langkah yang akan untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2019 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi selama tahun 2019. Beberapa permasalahan teknis yang terjadi adalah :

- 1) Adanya jadwal pemeran yang bersamaan sehingga kegiatan promosi penanaman modal tidak bisa diikuti secara optimal.
- 2) Adanya pelaku usaha yang belum memahami kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sehingga masih mengalami kendala terkait dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan.
- 3) Minimnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan terkait pendaftaran usaha melalui OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- 4) Sulit menghubungi dan bertemu penanggung jawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi
- 5) Tingkat kesalahan pencetakan dokumen Bidang Penyelenggaraan Layanan perizinan dan Non Perizinan A masih di atas 2% belum tercapai secara konsisten pada setiap bulannya
- 6) Ketidaksesuain waktu penyelesaian Izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena terkendala keterlambatan pemohon dalam melengkapi persyaratan Izin dan pembayaran retribusi.
- 7) Belum berjalannya fungsi *front office* sebagai verifikasi berkas permohonan, layanan informasi dan pengaduan, penyerahan izin, *back office* sebagai validasi berkas permohonan dan operator sebagai pencetak izin, di mana dengan kondisi pada saat ini *front office* yang diambil alih langsung oleh masing-masing Bidang penerbit izin sehingga jumlah izin keluar tidak sinkron dengan data register
- 8) Pelimpahan izin belum dituangkan ke dalam tupoksi yang terbaru dan penyesuaian nama menjadi DPMPTSP Kabupaten Buleleng

- 9) Arsip masih bersifat manual belum dilakukan scan arsip
- 10) Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai perlu waktu yang lebih lama untuk melakukan pengecekan jumlah izin terbit tepat waktu
- 11) Ketidaksesuai waktu penyelesaian ijin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena terkendala keterlambatan pemohon dalam melengkapi persyaratan ijin dan pembayaran retribusi.
- 12) Berdasarkan analisa hasil survei yang meliputi 9 unsur pelayanan meliputi Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Waktu Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi/Kemampuan Petugas, Perilaku Petugas, Kualitas Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, ada 3 unsur pelayanan yang di antaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan dalam hal ini adalah pemohon izin, yaitu;
 - a. Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Kualitas Sarana dan Prasarana, dengan nilai 2.8451
 - b. Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur, dengan nilai 3,1239
 - c. Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Waktu Penyelesaian, dengan nilai 3,1283

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk penyusunan data potensi desa.
2. Melakukan validasi data investasi secara maksimal, sehingga strategi promosi bisa ditingkatkan misalnya dengan memperluas cakupan promosi dengan pengembangan media yang menarik dan mudah digunakan.
3. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada PPTK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal misalnya dengan penerapan aplikasi siCANTIK, GIS reklame, Sitawa, Profil Investasi, OSS, dan LKPM *Online*.
5. Monitoring dan peninjauan ke lapangan perlu ditingkatkan dan pembinaan serta arahan kepada pengusaha lebih diintensifkan sehingga pengusaha lebih paham mengenai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan.
6. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pemantauan Penanaman Modal pada saat melaksanakan pemantauan dan pengawasan untuk diinformasikan kepada Pemilik usaha untuk melaporkan kewajiban penanaman Modal

7. Terkait dengan OSS perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang lebih ditingkatkan serta dari sisi SDM juga dipersiapkan misalnya dengan mengikuti Bimtek atau pelatihan.
8. Terkait hasil survey kepuasan masyarakat yang diperoleh, di mana unsur kualitas upaya perbaikannya pada Tahun Anggaran 2019 telah dianggarkan pembangunan gedung kantor baru yang sesuai dengan standar, pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan.

Berkaitan dengan perolehan nilai terendah pada 3 unsur pelayanan tersebut, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang riil, meliputi jumlah dan kompetensi personil, anggaran, alat kerja, serta sarana dan prasarana, maka akan dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Upaya perbaikan dari unsur Kualitas Sarana dan Prasana yaitu pada Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan pembangunan gedung kantor baru yang sesuai dengan standar PTSP, dan pengusulan pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan pada tahun anggaran berikutnya (APBD Tahun 2020).
- b. Upaya perbaikan dari unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, yaitu melalui optimalisasi pengawasan implementasi Standar Pelayanan Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), mulai dari penerimaan berkas permohonan, pemrosesan, dan penerbitan.
- c. Upaya perbaikan dari unsur Waktu Penyelesaian, yaitu melalui perbaikan dalam penerbitan perizinan yang memerlukan pengecekan lapangan dan sering melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan yang dikarenakan kesulitan kendaraan dinas roda 4 untuk melaksanakan pengecekan lapangan dengan melakukan penjadwalan dan pengaturan penggunaan kendaraan dinas yang ada.

Akhirnya, kesimpulan kami terhadap pencapaian target indikator kinerja yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, khususnya untuk tahun anggaran 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan keterbatasan kami. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



Drs. I Putu Artawan

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19611231 198603 1 225

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perbandingan Realisasi Nilai Investasi 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2018		2019		2020		2021		2022		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	1.236.414.246.708	1.248.778.389.000 (1%)	13.566.022.871.669 (997.21%)	1.261.266.173.000 (1%)	52.439.561.185.245 (286,55%)	1.273.878.835.000 (1%)	-	1.286.617.623.000 (1%)	-	1.299.483.799.000 (1%)	-	1.299.483.799.000 (1%)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



Drs. I Putu Artawan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19611231 198603 1 225



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA INDUK TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. I Putu Artawan

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

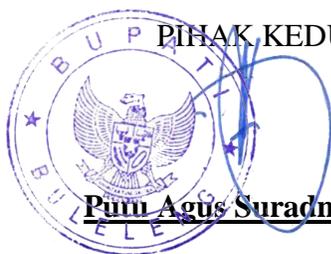
Nama : Putu Agus Suradnyana, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,

Putu Agus Suradnyana, ST



Singaraja, 18 Januari 2019

PIHAK PERTAMA,

Drs. I Putu Artawan

NIP. 196112311986031225

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.445.587.500,00	APBD 2019
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 5.893.650.000,00	APBD 2019
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 130.000.000,00	APBD 2019
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 20.000.000,00	APBD 2019
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 147.400.000,00	APBD 2019
6	Perencanaan Anggaran SKPD	Rp 138.368.200,00	APBD 2019
7	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 729.492.000,00	APBD 2019
8	Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	Rp 768.100.000,00	APBD 2019
9	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	Rp 389.597.300,00	APBD 2019
10	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A	Rp 655.200.000,00	APBD 2019
11	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	Rp 542.605.000,00	APBD 2019

Singaraja, 18 Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP,
Kabupaten Buleleng,



Bupati Buleleng,

Putu Agus Suradnyana, ST



Drs. i Putu Artawan

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611231 198603 1 225



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. I Putu Artawan

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Agus Suradnyana, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,

Putu Agus Suradnyana, ST

Singaraja, 30 September 2019



PIHAK PERTAMA,

Drs. I Putu Artawan

NIP. 19611231 198603 1 225

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	Prosentase Peningkatan Investasi Antar Wilayah dan Antar Sektor	65 %
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,80 Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 729.492.000,00	APBD 2019
2	Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	Rp 818.100.000,00	APBD 2019
3	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	Rp 419.597.300,00	APBD 2019
4	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A	Rp 700.200.000,00	APBD 2019
5	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	Rp 586.855.000,00	APBD 2019

Singaraja, 30 September 2019

Bupati Buleleng,



Putu Agus Suradnyana, ST

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP,
Kabupaten Buleleng,



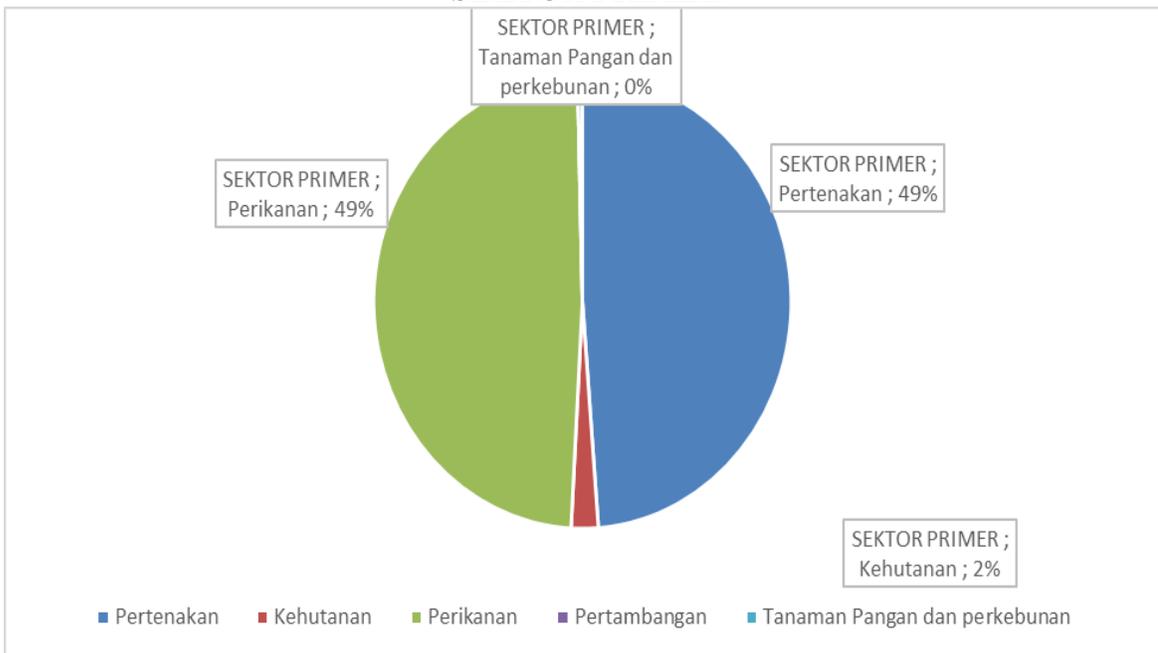
Drs. I Putu Artawan

Pembina Utama Muda (IV/c)

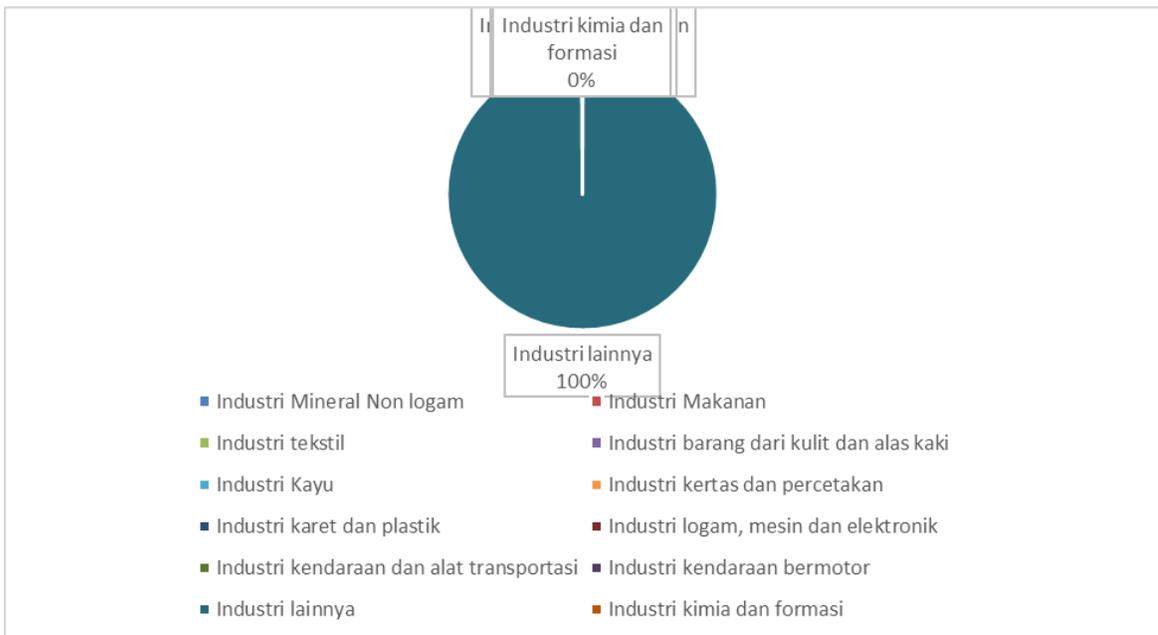
NIP. 19611231 198603 1 225

Lampiran 5. Grafik Rencana dan Realisasi Investasi Tahun 2019 Berdasarkan Sektor

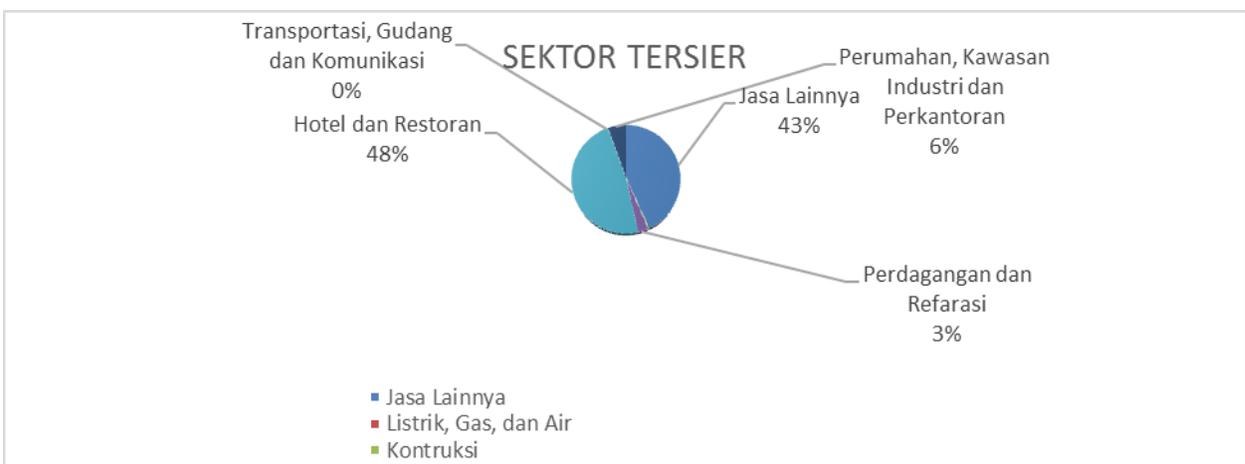
SEKTOR PRIMER



SEKTOR SEKUNDER



SEKTOR TERSIER



INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG SEMESTER I TAHUN 2019	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN :
80,81 (BAIK)	RESPONDEN
	JUMLAH : 234 Pemohon
	JENIS KELAMIN : L = 111 Orang P = 123 Orang
	PENDIDIKAN : SD = 0
	SMP = 0
	SMA = 45
	D III = 158
	S 1 = 31
	S 2 = -
	Periode Survey (01 - 01 - 2019 s/d 10 - 06 - 2019)
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN DINAS KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN	

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG SEMESTER II TAHUN 2019	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN :
80,84 (BAIK)	RESPONDEN
	JUMLAH : 242 Pemohon
	JENIS KELAMIN : L = 130 Orang P = 112 Orang
	PENDIDIKAN : SD = 0
	SMP = 2
	SMA = 73
	D III = 89
	S 1 = 75
	S 2 = -
	Periode Survey (01 - 07 - 2019 s/d 10 - 12 - 2019)
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN DINAS KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN	

Lampiran 7. Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2019

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	67.801.500	67.801.500	100	
	<i>Kegiatan:</i>	2	Out Put (keluaran)					
1.02.12.1.02.12.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Terkirim	exp	1200	5.262	439	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						213		
1.02.12.1.02.12.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	70.000.000	60.575.141	87	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah Rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	Rek/Tahun	84	84	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						96		
1.02.12.1.02.12.01.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	181.030.000	175.192.650	97	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah Kendaraan yang di sewa	unit/thn	24	24	100	
		3	Out Come (Hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	9.800.000	5.992.300	61	sesuai kebutuhan
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya tepat waktu	Unit	22	22	100	
		3	Out Come (Hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						87		
1.02.12.1.02.12.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	304.600.000	304.177.910	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	dok	12	12	100	
		3	Out Come (Hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	135.700.000	133.740.040	99	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	jenis	28	28	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.010	Alat Tulis Kantor	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	245.095.000	237.794.810	97	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah ATK tersedia tepat waktu	jenis	50	50	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	22.500.000	21.095.822	94	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah Barang cetak dan penggandaan tersedia tepat waktu	jenis	9	9	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						98		
1.02.12.1.02.12.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	5.000.000	4.993.890	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	jenis	4	4	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	178.820.000	178.634.295	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	24	24	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	8.400.000	8.400.000	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah bahan bacaan yang disediakan	rek	36	36	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	24.925.000	24.859.559	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	jenis	6	6	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.018	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	155.261.000	154.576.999	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	OH	115	146	127	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						109		
1.02.12.1.02.12.01.01.022	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	150.200.000	148.232.500	99	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah administrasi kepegawaian terselesaikan	dok	2	2	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	5.507.789.000	5.376.628.785,36	98	
1.02.12.1.02.12.01.02.003	Pembangunan Gedung kantor	2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	1	1,00	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	unit	1	1,00	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	41.400.000	41.386.841	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	jenis	6	6	100	
		3	Out Come (hasil)					
	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	jenis	6	6	100			
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02.019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	30.000.000	29.998.190	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	keg	10	10	100	
		3	Out Come (hasil)					
	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	keg	10	10	100			
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	102.400.000	96.995.433	95	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	unit	22	22	100	
		3	Out Come (hasil)					
	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	unit	22	22	100			
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						98		
1.02.12.1.02.12.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	7.000.000	6.999.850	100	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	unit	7	7	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	unit	7	7	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	5.000.000	4.999.390	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	unit	15	15	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	unit	15	15	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02.045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	64.200.000	63.972.500	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	dok	4	4	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	dok	4	4	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
1.02.12.1.02.12.01.03.006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	120.000.000	120.000.000	100	
		2	Out Put (keluaran)					

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	kali	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%	100	100	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	94.350.000	94.168.855	100		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	dok	6	6	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%	100	100	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	30.266.000	30.264.000	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	lap	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	%	100	100	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	154.218.200	154.039.705	100		
1.02.12.1.02.12.01.07.001	Penyusunan Anggaran SKPD	2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	dok	4	4	100		
		3 Out Come (hasil)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	dok	4	4	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	97.300.000	95.303.947	98	
	<i>Kegiatan:</i>	2	Out Put (keluaran)					
1.02.12.1.02.12.01.15.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah		Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM Investor yang ditindaklanjuti dengan MOU	kali	1	1,00	100	
		3	Out Come (hasil)			-		
			Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	kali	1	1,00	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.01.15.013	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	282.459.000	248.804.193	88	Ms. Siluta ten Hou
		2	Out Put (keluaran)					Mr. Adam Smits
			Jumlah investor yang berminat menanamkan modalnya	investor	5	5	100	Mr. Chong Hyuk
		3	Out Come (hasil)					Mr. Thomas
			Jumlah investor	investor	5	5	100	Mr. Alan Walker
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						96		
1.02.12.1.02.12.01.15.014	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	349.733.000	346.507.629	99	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	kali	7	7	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	kali	7	7	100	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	189.400.000	188.899.081	100	
	<i>Kegiatan:</i>	2	Out Put (keluaran)					
1.02.12.1.02.12.01.19.001	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah		Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	sistem	1	1	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Nilai investasi	nilai	1.261.266.173.000	51.805.228.586.065	4.107	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						1.436		
1.02.12.1.02.12.01.19.002	Kajian kebijakan penanaman modal	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	102.600.000	101.764.640	99	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	dok	1	1,00	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Nilai investasi	nilai	1.261.266.173.000	51.805.228.586.065	4.107	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						1.436		
1.02.12.1.02.12.01.19.003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	231.500.000	230.506.450	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	dok	4	4	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Nilai investasi	nilai	1.261.266.173.000	51.805.228.586.065	4.107	
TOTAL AKHIR KNERJA KEGIATAN						1.436		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.19.004	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	43.400.000	42.625.824	98	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah pengusaha yang paham dengan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	pengusaha	100	100	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Nilai investasi	nilai	1.261.266.173.000	51.805.228.586.065	4.107	
TOTAL AKHIR KNERJA KEGIATAN						1.435		
1.02.12.1.02.12.01.19.005	Penyusunan perencanaan penanaman modal	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	132.000.000	130.425.000	99	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	dok	1	1,00	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Nilai investasi	nilai	1.261.266.173.000	51.805.228.586.065	4.107	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						1.435		
1.02.12.1.02.12.01.19.007	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	119.200.000	116.608.080	98	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	dok	1	1,00	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Nilai investasi	nilai	1.261.266.173.000	51.805.228.586.065	4.107	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						1.435		
1.02.12.1.02.12.01.20.	Program Penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan	1	Input (masukan)					

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terpadu							
			Dana	Rp	76.500.000	75.132.291	98	
	<i>Kegiatan:</i>	2	Out Put (keluaran)					
1.02.12.1.02.12.01.20.001	Penyusunan data dan pelaporan pelayanan perijinan		Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perijinan	buku	4	4	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.01.20.002	Sosialisasi pelayanan perijinan terpadu	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	202.997.300	200.426.659	99	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah media sosialisasi perijinan	media	3	3	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.20.003	Evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	140.100.000	139.584.438	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat	dok.	2	2	100	
		3	Out Come (hasil)					
			Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.21.	Program Penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan bidang A							
		1	Input (masukan)					

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dana	Rp	497.800.000	490.509.478	99		
	<i>Kegiatan:</i>	2	Out Put (keluaran)					
1.02.12.1.02.12.01.21.001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU lokasi,IMB,Ijin Prinsip,HO/SI		Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SI yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	ijin	2500	3.290	131.60	
		3	Out Come (hasil)					
			indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan A	nilai	80,80	80,81	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						131.60		
1.02.12.1.02.12.01.21.002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sector Pertanian, Perikanan dan Ijin IUJK, Reklama	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	202.400.000	193.278.048	95	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan dan Ijin IUJK, Reklama yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	ijin	500	656	131.20	
		3	Out Come (hasil)					
			indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan A	nilai	80,80	80,84	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						131.20		
1.02.12.1.02.12.01.22.	Program Penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan bidang B	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	292.649.000	291.710.193	100	
	<i>Kegiatan:</i>	2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah berkas permohonan perizinan sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan yang	ijin	1500	2.405	160.33	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan					
1.02.12.1.02.12.01.22.001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sector Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	3	Out Come (hasil)					
			indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan B	nilai	80,80	80,84	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						160.33		
1.02.12.1.02.12.01.22.002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada Sector Pariwisata dan Kesehatan	1	Input (masukan)					
			Dana	Rp	294.206.000	293.699.078	100	
		2	Out Put (keluaran)					
			Jumlah berkas permohonan perizinan sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	ijin	1500	1.731	115.40	
		3	Out Come (hasil)					
			indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan B	nilai	80,80	80,84	100	
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						115.40		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



Drs. J Putu Artawan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19611231 198603 1 225

REKAP PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			Output	Outcome	Tot Kin Keg
			Pagu	Realisasi	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1.02.12.1.02.12.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP Prov BBNKB,DAU	67.801.500	67.801.500	100	439	100	213
1.02.12.1.02.12.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU, PAD,BHP PROV BBKB	70.000.000	60.575.141	87	100	100	96
1.02.12.1.02.12.01.01.003	Penyediaan jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	DAU, PAD	181.030.000	175.192.650	97	100	100	99
1.02.12.1.02.12.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	DAU	9.800.000	5.992.300	61	100	100	87
1.02.12.1.02.12.01.01.007	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,BKK BADUNG,BHP PROV BBKB,BHP PROV PKB	304.600.000	304.177.910	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP Prov BBNKB,PAD,DAU	135.700.000	133.740.040	99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DAU, PAD	245.095.000	237.794.810	97	100	100	99
1.02.12.1.02.12.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DBH PPH, PAD	22.500.000	21.095.822	94	100	100	98
1.02.12.1.02.12.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD	5.000.000	4.993.890	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU,BKK BADUNG	178.820.000	178.634.295	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DBH PPH,DAU	8.400.000	8.400.000	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	BHP PROV BBNKB,DAU,BHP PROV BBKB	24.925.000	24.859.559	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/Dalam Daerah	BHP PROV BBNKB,DAU,BHP PROV BBKB	155.261.000	154.576.999	100	127	100	109
1.02.12.1.02.12.01.01.022	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian	DBH PPH,BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,BHP PROV BBKB	150.200.000	148.232.500	99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.02.12.1.02.12.01.02.003	Pembangunan gedung kantor	DBH PPH, DAU,BKK BADUNG,PAD	5.507.789.000	5.376.628.785,36	98	100	100	99
1.02.12.1.02.12.01.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	DAU,PAD,BHP PROV BBKB	41.400.000	41.386.841	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar nasional	DAU,PAD,BHP PROV BBKB	30.000.000	29.998.190	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,BHP PROV BBKB	102.400.000	96.995.433	95	100	100	98
1.02.12.1.02.12.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	DBH PPH,DAU	7.000.000	6.999.850	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	DBH PPH,DAU	5.000.000	4.999.390	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,BHP PROV BBKB,BHP PROV PKB	64.200.000	63.972.500	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			Output	Outcome	Tot Kin Keg
			Pagu	Realisasi	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.03.006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	DAU,BKK BADUNG	120.000.000	120.000.000	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan							
1.02.12.1.02.12.01.06.001	Penyusunan laporan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	BHP PROV BBNKB,DAU,PAD	94.350.000	94.168.855	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DAU	30.266.000	30.264.000	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.07.	Program perencanaan anggaran SKPD							
1.02.12.1.02.12.01.07.001	Penyusunan anggaran SKPD	DBH PPH,BHP PROV BBNKB,DAU,PAD,BHP PROV BBKB,BHP PROV PKB	154.218.200	154.039.705	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
1.02.12.1.02.12.01.15.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	DBH PPH,BHP PROV BBNKB,DAU,PAD	97.300.000	95.303.947	98	100	100	99
1.02.12.1.02.12.01.15.013	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,DBH PPH,BHP PROV BBKB	282.459.000	248.804.193	88	100	100	96
1.02.12.1.02.12.01.15.014	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal	DBH PPH,BHP PROV BBNKB,DAU,PAD	349.733.000	346.507.629	99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi							
1.02.12.1.02.12.01.19.001	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	BHP Prov BBNKB,BHP PROV BBKB,DAU,PAD	189.400.000	188.899.081	100	100	4.107	1.436
1.02.12.1.02.12.01.19.002	kajian kebijakan penanaman modal	BHP Prov BBNKB,BHP PROV BBKB,DAU,PAD	102.600.000	101.764.640	99	100	4.107	1.436
1.02.12.1.02.12.01.19.003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,BHP PROV BBKB	231.500.000	230.506.450	100	100	4.107	1.436
1.02.12.1.02.12.01.19.004	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD	43.400.000	42.625.824	98	100	4.017	1.435
1.02.12.1.02.12.01.19.005	Penyusunan perencanaan penanaman modal	BHP Prov BBNKB,BHP PROV BBKB,DAU,PAD	132.000.000	130.425.000	99	100	4.107	1.435
1.02.12.1.02.12.01.19.007	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	DBH PPH,BHP PROV BBNKB,DAU,PAD	119.200.000	116.608.080	98	100	4.107	1.435
1.02.12.1.02.12.01.20.	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan							
1.02.12.1.02.12.01.20.001	Penyusunan data dan pelaporan pelayanan perijinan	DBH PPH,BHP PROV BBNKB,DAU,BHP PROV BBKB,PAD,BHP PROV PKB	76.500.000	75.132.291	98	100	100	99
1.02.12.1.02.12.01.20.002	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	DBH PPH,DAU,BHP PROV BBNKB,BHP PROV BBKB,PAD	202.997.300	200.426.659	99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.20.003	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	DBH PPH,BHP PROV BBNKB,DAU,BHP PROV BBKB	140.100.000	139.584.438	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.21.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A							

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			Output	Outcome	Tot Kin Keg
			Pagu	Realisasi	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.21.001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU lokasi,IMB,Ijin Prinsip,HO/SI	DBH PPH,BHP PROV BBNKB,DAU,BKK BADUNG,PAD,BHP PROV BBKB	497.800.000	490.509.478	99	131.60	100	110
1.02.12.1.02.12.01.21.002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sector Pertanian,Perikanan,dan Ijin IUJK,Reklama	DBH PPH,BHP PROV BBNKB,DAU,PAD	202.400.000	193.278.048	95	131.20	100	105
1.02.12.1.02.12.01.22.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B							
1.02.12.1.02.12.01.22.001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sector Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	BHP PROV BBNKB,DAU,BHP PROV BBKB,PAD	292.649.000	291.710.193	100	160.33	100	114
1.02.12.1.02.12.01.22.002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada Sector Pariwisata dan Kesehatan	DBH PPH,BHP PROV BBNKB,DAU,PAD,BHP PROV BBKB	294.206.000	293.699.078	100	115.40	100	106
TOTAL			10.970.000.000	10.731.305.994,36	97.82	109.54	684	299

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



Drs. I Putu Artawan

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19611231 198603 1 225

Lampiran 8. Data Rekapitulasi Jumlah Ijin Yang Terbit Tahun 2019

**REKAPITULASI JUMLAH IJIN TERBIT
TAHUN 2019**

NO	JENIS IJIN	DATA IJIN												KETERANGAN Total Perijinan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
PELAYANAN A I,II														
PENANAMAN MODAL														
1	Persetujuan Prinsip Membangun	-	-	9	16	24	9	18	14	17	22	4	17	
2	Surat Ijin Tempat Usaha(SITU)	22	13	16	33	45	20	24	-	-	-	-	-	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	133	91	284	394	434	191	384	354	112	132	261	197	296
2	Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERTANAHAN														
1	Izin Lokasi (IL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Izin Membuka Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERHUBUNGAN														
1	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendataan dan Lepas Landas Helikopter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296
JUMLAH IJIN PELAYANAN A/I,II														
TOTAL JUMLAH IJIN PELAYANAN A/I,II														
PELAYANAN A III														
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3	5	6	6	8	5	4	10	-	7	4	-	5
2	Sertifikat Laik Fungsi(SLF)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-
3	Persetujuan Pemakaian Tanah Untuk :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Reklame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Menara, gardu, atau bangunan lainnya.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Jaringan air bersih.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Jaringan listrik.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Jaringan telepon/seluler.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f. Pemadam kebakaran.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g. Penerangan Jalan Umum (JPU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sertifikat Kepemilikan Banguna Gedung (SKBG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KETENAGAKERJAAN														
1	Validasi Dana Kompensasi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)	-	-	-	-	-	3	4	5	10	17	5	10	-
PERIKANAN														
1	Izin Usaha Perikanan (IUP)	6	5	1	1	3	2	3	18	8	11	19	11	8

JENIS IJIN	DATA IJIN												KETERANGAN	
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL	Non Perijinan
9 izin usaha Pemotongan hewan - hewan dan penyediaan Daging	1						1	1				1	4	
10 izin penggilingan padi dn Penyosohan Beas					1		1						2	
11 Izin Pengangkutan Kayu Rakyat														
12 Pendaftaran Usaha Perkebunan														
13 Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan														
14 Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura														
15 Pendaftaran usaha Peternakan														
PERDAGANGAN														
1 Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)	84	57	50	57	87	58	72	79	94	89	57	44	828	
2 Izin Pengadaan dan pembelian daun tembakau Hijau dan Tembakau Krosok														
3 Izin Usaha Sarang Walet														
4 Izin Penimbunan Bahan bakar Minyak	2			1	1		1						5	
5 Izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)														
6 izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)														
7 Izin Usaha Toko Modern (IUTM)														
8 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	89	62	61	62	103	64	88	88	116	106	65	54	958	958
9 Tanda daftar Gudang (TDG)												3	3	3
10 Tanda Pendaftaran agen Atau Distrobutor Barang dan Jasa														
11 Surat tanda Pendaftaran Waralaba														
INDUSTRI														
1 Izin usaha Industri (IUI)	5		6	4	7		11	5	4	10	4	5	61	
2 Izin perluasan Usaha Industri (IPUI)														
3 Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)														
4 Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)														
JUMLAH	208	139	139	132	243	151	218	253	258	289	209	166	2405	1118
PELAYANAN BIII														
KESEHATAN														
1 Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe C														
2 Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe D														
3 Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe C														
4 Izin Operasional Rumah sakit Swasta Tipe D		2											2	
5 Izin Mendirikan RS Pratama Tipe D														
6 Izin Operasional RS Pratama Tipe D														
7 Izin Mendirikan Puskesmas														
8 Izin Operasional Puskesmas														
9 Izin Apotek		3	3	2	3	3	2	3	4	4	2	2	31	
10 Izin Toko Obat										2		1	3	
11 Izin Toko Alat Kesehatan										1			1	
12 Izin Optikal														
13 Izin usaha Mikro Obat Tradisional														
14 Izin Praktej Dokter Umum	5	3	13	12	16	11	10	5	5	11	4	6	101	
15 Izin Praktek Dokter Spesialis	3	8	26	11	13	7	11	11	13	8	8	12	131	
16 Izin Praktek Dokter Gigi		2	1	1	6	1	7	4	2		2		26	
17 Izin Praktek Dokter Internshif														
18 Izin Praktek Bidan	13	4	8	36	18	23	29	19	26	35	7	32	250	

Lampiran 9. Rekapitulasi Data Investasi yang Ada di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

REKAPITULASI PERKEMBANGAN RENCANA DAN REALISASI (PMA-PMDN) TAHUN 2019

LOKASI : KABUPATEN BULELENG
 PERIODE : 1 OKTOBER 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

NO	BULAN	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)												PENANAMAN MODAL ASING (PMA)											
		TARGET				RENCANA				REALISASI				TARGET				RENCANA				REALISASI			
		JML PROYEK	Nilai Investasi (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROYEK	Pendaftaran Investasi (PPM) (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROYEK	IZIN USAHA (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROYEK	Nilai Investasi (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROYEK	Pendaftaran Investasi (PPM) (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROYEK	IZIN USAHA (Rp.)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	JANUARI	66	1.780.964.202.178	789		66	1.780.964.202.178	789		66	178.096.420.218	789		6	94.685.350.000	187		6	94.685.350.000	187		6	9.468.535		
2	FEBRUARI	30	17.812.194.317.144	430		30	17.812.194.317.144	430		30	1.870.267.641.823	430		5	132.725.043.225	151		5	132.725.043.225	151		5	18.006.771		
3	MARET	40	109.618.669.859	605		40	109.618.669.859	605		40	990.619.792.952	605		4	9.709.621.617.848	262		4	9.709.621.617.848	262		4	982.332.681		
	JML TRW I	136	19.702.777.189.181	1.824	-	136	19.702.777.189.181	1.824		136	3.038.983.854.993	1.824		15	9.937.032.011.073	600	-	15	9.937.032.011.073	600		15	1.009.807.988		
4	APRIL	32	67.856.077.015	417		32	67.856.077.015	417		32	310.683.993.201	417		8	192.730.514.800	357		8	192.730.514.800	357		8	69.763.450		
5	MEI	25	129.149.136.154	726		25	129.149.136.154	726		25	472.155.295.715	726		13	67.148.000.000	83		13	67.148.000.000	83		13	66.841.725		
6	JUNI	38	19.944.667.091.076	540		38	19.944.667.091.076	540		38	2.615.506.544.615	540		4	44.847.450.000	44		4	44.847.450.000	44		4	67.969.070		
	JML TRW II	95	20.141.672.304.245	1.683		95	20.141.672.304.245	1.683		95	3.398.345.833.531	1.683		25	304.725.964.800	484		25	304.725.964.800	484	-	25	204.574.246		
7	JULI	27	61.623.792.308	814		27	61.623.792.308	814		27	1.141.679.124.186	814		30	41.930.000.000	858		30	41.930.000.000	858		30	196.579.047		
8	AGUSTUS	47	185.315.334.144	972		47	185.315.334.144	972		47	817.294.884.632	972		51	25.200.000.000	1.013		51	25.200.000.000	1.013		51	176.545.122		
9	SEPTEMBER	39	1.347.261.488.671	769		39	1.347.261.488.671	769		39	1.267.702.940.833	769		43	57.690.501.643	849		43	57.690.501.643	849		43	243.869.784		
	JML TRW III	113	1.594.200.615.123	2.555		113	1.594.200.615.123	2.555	-	113	3.226.676.949.651	2.555		124	124.820.501.643	2.720		124	124.820.501.643	2.720		124	616.993.955		
10	OKTOBER	44	37.746.468.385	365		44	37.746.468.385	365		44	1.605.324.835.315	365		3	8.424.200.000	15		3	8.424.200.000	15		3	326.039.247		
11	NOPEMBER	12	109.130.935.500	132		12	109.130.935.500	132		12	1.786.155.220.541	132		2	26.900.000.000	25		2	26.900.000.000	25		2	338.957.960		
12	DESEMBER	31	452.130.995.295	255		31	452.130.995.295	255		31	587.397.541.854	255		-	-	-		-	-	-		-	-		
	JML TRW IV	87	599.008.399.180	752	-	87	599.008.399.180	752	-	87	3.978.877.597.710	752	-	5	35.324.200.000	40	-	5	35.324.200.000	40	-	5	664.997.208		
	TOTAL INV.	431	42.037.658.507.729	6.814		431	42.037.658.507.729	6.814		431	13.642.884.235.886	6.814		169	10.401.902.677.516	3.844	-	169	10.401.902.677.516	3.844	-	169	2.496.373.397		

Ket : - Kurs = Rp.

Keterangan :
 - N : Nilai Investasi
 - P : Proyek
 - Kurs Dollar disesuaikan dengan APBN / APBNP Tahun Berjalan

Total NI (PMA & PMDN)

Total Rencana

Total Realisasi

Total P (PMA & PMDN)

Total Rencana

Total Realisasi

:
 Rp. 52.439.561.185.245
 Rp. 16.139.257.633.447
 :
 :
 : 600
 : 600

Mengetahui,
 Kabid Pengendalian, Pelaksanaan dan
 Informasi Penanaman Modal


Ida Ayu Pancani Yulianti, SH., Msi
 NIP. 19710705 199703 2 009

Singaraja, 10 Januari 2020

Kasi Sistem Informasi dan
 Pembinaan Penanaman M


Dewantoro, A.Md.
 NIP. 19650528 198603 1 0

REKAPITULASI DATA INVESTASI YANG ADA DI KABUPATEN BULELENG
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2019

NO	BULAN	SIUP	PPM (PMDN)	PPM (PMA)	TOTAL
1	JANUARI	17.749.000.000	1.780.964.202.178	94.685.350.000	1.798.713.202.178
2	FEBRUARI	10.893.318.121	17.812.194.317.144	132.725.043.225	17.823.087.635.265
3	MARET	10.653.000.000	109.618.669.859	9.709.621.617.848	120.271.669.859
4	APRIL	11.420.000.000	67.856.077.015	192.730.514.800	79.276.077.015
5	MEI	13.773.500.000	129.149.136.154	67.148.000.000	142.922.636.154
6	JUNI	8.220.000.000	19.944.667.091.076	44.847.450.000	19.952.887.091.076
7	JULI	11.167.500.000	61.623.792.308	41.930.000.000	72.791.292.308
8	AGUSTUS	13.574.719.667	185.315.334.144	25.200.000.000	198.890.053.811
9	SEPTEMBER	14.939.500.000	1.347.261.488.671	57.690.501.643	1.362.200.988.671
10	OKTOBER	15.726.000.000	37.746.468.385	8.424.200.000	53.472.468.385
11	NOVEMBER	9.165.000.000	109.130.935.500	26.900.000.000	118.295.935.500
12	DESEMBER	7.934.000.000	452.130.995.295	-	460.064.995.295
		145.215.537.788	42.037.658.507.729	10.401.902.677.516	52.584.776.723.033

Singaraja, 10 Januari 2020

Mengetahui,
Kabid Pengendalian, Pelaksanaan dan
Informasi Penanaman Modal

Kasi Sistem Informasi dan
Pembinaan Penanaman Modal



Ida Ayu Pancani Yulianti, SH., Msi
NIP. 19710705 199703 2 009



Dewantoro, A. Md
NIP. 19650528 198603 1 013